



Ikhda Nurnoviyati<sup>1</sup>

## PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT DESA PESAREAN ADIWERA TEGAL

### Abstrak

Komunikasi merupakan proses dimana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain, baik dengan menggunakan media atau tidak, yang kemudian menimbulkan dampak tertentu. Komunikasi pada dasarnya melibatkan pertukaran ide atau gagasan secara sederhana antara individu yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dengan melihat dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang idealnya. komunikasi politik yang baik adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat desa. Dengan komunikasi yang efektif, pemerintah desa dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Komunikasi; Politik; Pelayanan Publik

### Abstract

Communication is a process where a person conveys a message to others, whether using the media or not, which then causes a certain impact. Communication basically involves a simple exchange of ideas or ideas between the individuals involved. This research uses a qualitative method, qualitative research is research that aims to understand social reality by seeing the world as it is, not as it is ideal. Good political communication is a long-term investment that will bring benefits to all village communities. With effective communication, village governments can create a more responsive, transparent, and accountable government, which will ultimately improve the welfare of the community.

**Keywords:** Communication; Politics; Public Service

### PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses dimana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain, baik dengan menggunakan media atau tidak, yang kemudian menimbulkan dampak tertentu. Komunikasi pada dasarnya melibatkan pertukaran ide atau gagasan secara sederhana antara individu yang terlibat. Dengan kata lain, ini adalah kegiatan dimana satu pihak menyampaikan ide atau pesan kepada pihak lain dengan harapan mencapai kesepakatan bersama mengenai ide atau pesan yang disampaikan tersebut. Dalam konteks ini, komunikasi juga dapat melibatkan berbagai jenis media, mulai dari lisan hingga tulisan, serta ekspresi non-verbal seperti bahasa tubuh. Dalam komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut membentuk identitas individu, memperkuat koneksi sosial, dan mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Peran sentral pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak terbantahkan. Desa, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan penduduknya, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai aspek lainnya tersedia dan terjangkau bagi seluruh warga

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal  
email: ikhda87@gmail.com

desa. Pemerintahan desa harus memahami secara mendalam kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta bertindak secara proaktif untuk memenuhiinya. Salah satu fokus utama pemerintahan desa adalah memastikan adanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga. Hal ini termasuk pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan seperti sekolah dasar dan mencegah, serta dukungan terhadap program-program pendidikan non-formal bagi warga yang belum memiliki kesempatan untuk bersekolah secara formal. Pemerintahan desa juga memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar, termasuk fasilitas kesehatan, program imunisasi, dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, mereka harus memastikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air terjaga dengan baik untuk memfasilitasi aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, komunikasi politik menjadi alat yang sangat berharga bagi pemerintahan desa. Komunikasi politik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal. Dengan berkomunikasi secara efektif, pemerintahan desa dapat memberikan informasi tentang program-program dan kebijakan yang sedang dilaksanakan, serta mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini membantu hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan desa. Selain itu, komunikasi politik juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan desa. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka tentang kegiatan dan anggaran pemerintah desa, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintahannya dan memastikan penggunaan sumber daya publik secara efisien dan adil.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi, pemerintahan desa harus terus beradaptasi dan berinovasi dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Komunikasi politik yang efektif menjadi salah satu instrumen kunci dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komunikasi politik didalam ranah lokal, terutama dalam desa, memiliki peranan yang sangat vital dalam mengelola pelayanan publik dengan efisien dan berkualitas.

Sebagai contoh utama, Desa Pesarean Adiwerna Tegal mencuat sebagai model yang berhasil dalam menerapkan komunikasi politik yang efektif untuk meningkatkan kinerja layanan kepada penduduknya. Dalam hal ini, komunikasi politik tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh dukungan politik semata, melainkan juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Kemudian Pelayanan Publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat harus ditingkatkan untuk menunjang Perkembangan suatu wilayah karena masyarakat merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kota/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di mata warga masyarakatnya

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dengan melihat dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang idealnya, oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif harus memiliki sifat berpikiran terbuka. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif, lokasi pada penelitian ini adalah Desa Pesarean Adiwerna.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan cara observasi, wawancara , dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan di sekitar Desa Pesarean, wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi lebih dalam yang tidak dapat ditemukan melalui observasi tentang stunting di Desa Pesarean, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data anak yang terkena stunting. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial dengan melihat dunia sebagaimana adanya dan mengkaji pengaruh komunikasi politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap tingkat kinerja pelayanan publik di desa pesarean. Dan Partisipasi Masyarakat sangat penting dalam Pembuatan Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah Desa Pesarean Adiwerna seperti banyak desa di Indonesia, berada pada fase penting dalam pengelolaan dan pengembangan pemerintahannya. Salah satu elemen vital yang dapat mendorong desa ini menuju kemajuan yang lebih berkelanjutan dan inklusif adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap pengambilan keputusan tidak hanya memperkaya proses tersebut tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga desa.

### **Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Program**

Program pemerintah desa yang dirancang dengan partisipasi masyarakat biasanya lebih berhasil dalam implementasinya. Karena masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, mereka cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap program tersebut. Hal ini meningkatkan dukungan dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan program, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan keberhasilan program itu sendiri. Selain itu, masukan dari masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah desa, sehingga strategi pelaksanaan dapat disusun dengan lebih baik untuk mengatasi kendala tersebut.

### **Membangun Kepercayaan dan Transparansi**

Komunikasi politik yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan. Ketika pemerintah desa bersikap transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi, warga akan merasa lebih dihargai dan percaya bahwa aspirasi mereka didengar. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Melalui pertemuan rutin, forum diskusi, dan konsultasi publik, pemerintah desa dapat menyediakan platform bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan. Dialog yang berkelanjutan ini juga membantu menciptakan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akomodatif dan inklusif.

### **Mengatasi Hambatan Partisipasi**

Di Desa Pesarean, terdapat beberapa hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi masyarakat, seperti kurangnya akses informasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau persepsi bahwa pendapat mereka tidak akan dihiraukan. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah desa perlu mengambil langkah proaktif dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, membangun saluran komunikasi yang efektif, dan menunjukkan bahwa masukan masyarakat benar-benar diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan.

### **Memperkuat Demokrasi Lokal**

Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasi program, warga desa belajar memahami dan menghargai nilai-nilai demokrasi. Mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan desa mereka dan lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses ini mengurangi kesenjangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata warga.

## Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan

Masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan demokratis di Desa Pesarean. Melalui komunikasi politik yang efektif dan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa dapat membangun hubungan yang kuat dengan warga. Ini tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan program yang lebih berhasil, tetapi juga membentuk fondasi yang kokoh untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya tujuan yang diinginkan, tetapi juga elemen penting dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Di Desa Pesarean, peningkatan kinerja pelayanan publik dapat dicapai melalui komunikasi politik yang efektif. Komunikasi politik yang baik tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik disampaikan dengan cara yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Komunikasi politik yang efektif adalah fondasi yang penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah, pemerintah desa dapat mendengar kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat secara langsung. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk merespons dengan kebijakan dan layanan yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

Transparansi dalam pemerintahan desa adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan menyampaikan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang berbagai layanan publik, pemerintah desa dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan partisipasi warga. Penggunaan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam hal ini. Misalnya, melalui website resmi desa atau aplikasi mobile, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai prosedur administrasi, jadwal pelayanan, dan persyaratan yang diperlukan. Selain itu, penyebarluasan informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat menjangkau lebih banyak warga, termasuk mereka yang mungkin tidak aktif secara fisik dalam kegiatan desa.

Komunikasi politik yang efektif juga memerlukan aparatur desa yang kompeten dan profesional. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi pegawai desa sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan teknologi informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, pengembangan kapasitas ini juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui komunikasi politik yang efektif, Desa Pesarean dapat mencapai peningkatan kinerja pelayanan publik yang signifikan. Transparansi dan aksesibilitas layanan, efisiensi administrasi, dan saluran komunikasi yang terbuka semuanya berkontribusi pada terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pelayanan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Komunikasi politik yang efektif bukan hanya sekadar alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga merupakan fondasi yang penting untuk membangun pemerintahan desa yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Melalui penggunaan teknologi informasi dan peningkatan efisiensi administrasi, Desa Pesarean dapat menjadi contoh bagaimana komunikasi yang baik dapat mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Namun dalam mengimplementasikannya terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam konteks ini seperti :

1. Keterbatasan Sumber Daya

termasuk anggaran, teknologi, dan tenaga kerja terlatih, menjadi tantangan utama. Desa Pesarean sering kali mengalami kendala finansial yang membatasi kemampuan untuk mengadopsi teknologi informasi yang canggih atau menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit bagi pemerintah desa untuk membangun dan memelihara saluran komunikasi yang efektif.

2. Kurangnya Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung komunikasi politik yang efektif. Namun, di banyak desa, termasuk Desa Pesarean, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas. Keterbatasan ini meliputi akses

internet yang tidak merata, kurangnya perangkat komputer, dan minimnya fasilitas pendukung lainnya. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya untuk mengembangkan sistem komunikasi berbasis teknologi akan terhambat.

3. Resistensi terhadap perubahan

Perubahan sering kali menghadapi resistensi, terutama ketika melibatkan perubahan budaya kerja dan kebiasaan lama. Di Desa Pesarean, resistensi terhadap perubahan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa itu sendiri. Kebiasaan lama yang sudah mengakar dan ketakutan akan hal yang baru dapat menghambat implementasi komunikasi politik yang lebih modern dan efektif.

4. Budaya Birokrasi yang Kaku

Birokrasi yang kaku dan prosedur yang rumit dapat memperlambat proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Struktur birokrasi yang hierarkis membuat aliran informasi menjadi lambat dan tidak efisien. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah desa untuk merespons secara cepat terhadap kebutuhan dan masukan dari masyarakat. Reformasi birokrasi yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk mendukung komunikasi yang lebih efektif.

5. Hambatan Sosial dan Kultural

Hambatan sosial dan kultural juga memainkan peran penting dalam menghambat komunikasi politik yang efektif. Misalnya, perbedaan bahasa, norma sosial, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima dan memproses informasi. Ketidakpercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mungkin berasal dari pengalaman negatif di masa lalu, juga dapat menjadi penghalang utama dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

### **Solusi Mengatasi Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi**

Dari Hambatan Dan Tantangan yang telah disebutkan sebelumnya ada langkah strategis yang komprehensif untuk mengatasinya Seperti :

- a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan memastikan akses internet yang merata di seluruh desa.
- b. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi aparat desa dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan literasi teknologi.
- c. Pendekatan Partisipatif: Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui forum-forum diskusi, pertemuan rutin, dan konsultasi publik yang inklusif.
- d. Reformasi Birokrasi: Menerapkan reformasi birokrasi yang lebih fleksibel dan adaptif untuk mempercepat aliran informasi dan pengambilan keputusan.
- e. Kampanye Edukasi: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan penggunaan teknologi dalam komunikasi.
- f. Peningkatan Anggaran Desa: Mengoptimalkan anggaran dengan secara efektif dan efisien, melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaanya dan memanfaatkan dana desa secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- g. Pengukuran Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perangkat desa dan program yang dilaksanakan, membuka akses publik terhadap informasi mengenai kinerja pemerintah desa.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta hambatan ini, Desa Pesarean dapat membangun komunikasi politik yang lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi Implementasi Meningkatkan Komunikasi Politik dalam Pemerintahan Desa untuk Pelayanan Masyarakat yang Lebih Baik di Desa Pesarean Komunikasi politik yang efektif merupakan fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan partisipatif. Di Desa Pesarean penguatan komunikasi politik dapat membawa dampak besar pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Untuk mencapai hal ini, diperlukan strategi

implementasi yang konkret dan menyeluruh. Berikut adalah beberapa langkah strategis untuk meningkatkan komunikasi politik dan memastikan peningkatan kinerja pelayanan masyarakat :

### **Pengembangan Infrastruktur Teknologi**

#### a. Akses Internet yang Merata

Langkah pertama adalah memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai. Ini bisa dicapai dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kecepatan internet. Pemerintah desa dapat mengajukan dana bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk mendukung inisiatif ini.

#### b. Penyediaan Perangkat Teknologi

Pemerintah desa perlu menyediakan perangkat teknologi yang diperlukan, seperti komputer dan perangkat lunak, di kantor desa dan pusat komunitas. Hal ini akan memungkinkan aparatur desa dan masyarakat untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam platform komunikasi digital.

### **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**

#### a. Pelatihan Keterampilan Komunikasi

Pemerintah desa harus mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan komunikasi publik aparatur desa, termasuk teknik berbicara di depan umum, penulisan pesan yang efektif, dan penggunaan media sosial. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan mengundang pakar komunikasi atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

#### b. Literasi Teknologi untuk Masyarakat

Mengadakan program edukasi untuk meningkatkan literasi teknologi di kalangan masyarakat sangat penting. Program ini bisa mencakup pelatihan dasar komputer, penggunaan internet, dan media sosial. Fokus khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia dan perempuan, untuk memastikan mereka dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi secara efektif.

### **Penerapan Pendekatan Partisipatif**

#### a. Forum Diskusi dan Konsultasi Publik

Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang rutin. Pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan bulanan di balai desa atau menggunakan platform online untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkini dan rencana kebijakan.

#### b. Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat

Membentuk kelompok kerja masyarakat yang terdiri dari perwakilan berbagai lapisan masyarakat. Kelompok ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi dan umpan balik dari warga.

### **Reformasi Birokrasi**

#### a. Prosedur yang Lebih Fleksibel

Menerapkan prosedur birokrasi yang lebih fleksibel dan efisien untuk mempercepat aliran informasi dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa dapat meninjau dan menyederhanakan proses administratif yang rumit dan mempercepat waktu respons.

#### b. Sistem Manajemen Informasi

Mengembangkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk mempermudah akses dan pengolahan data. Sistem ini dapat mencakup database warga, catatan layanan publik, dan platform pelaporan masalah, yang memungkinkan transparansi dan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Kampanye Edukasi dan Kesadaran**

#### a. Sosialisasi dan Informasi

Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan penggunaan teknologi dalam komunikasi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk radio lokal, pamflet, dan media sosial.

b. Dialog Terbuka

Mengadakan sesi dialog terbuka secara berkala antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membahas isu-isu penting dan mencari solusi bersama. Dialog ini harus dilakukan dalam suasana yang inklusif dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, Desa Pesarean dapat mengalami peningkatan signifikan dalam kinerja pelayanan publik. Komunikasi politik yang lebih baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program-program desa, sehingga meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif pembangunan. Infrastruktur teknologi yang memadai dan literasi teknologi yang lebih baik akan membuka akses informasi yang lebih luas, memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi birokrasi akan mempercepat proses administratif dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sementara itu, kampanye edukasi dan dialog terbuka akan membangun kepercayaan dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa dan masyarakat.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik yang baik adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat desa. Dengan komunikasi yang efektif, pemerintah desa dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Pemerintahan Desa memiliki peran yang vital dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Pesarean. Komunikasi politik yang efektif antara pemerintah desa dan warganya dapat menguatkan hubungan saling percaya dan membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan terbukanya saluran komunikasi politik, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat terwujud. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah desa, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. Selain manfaat tersebut, komunikasi politik yang efektif juga dapat membentuk citra positif bagi pemerintah desa, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan setempat. Dampaknya, masyarakat akan lebih cenderung untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Namun, untuk mencapai komunikasi politik yang efektif, diperlukan komitmen dan kemampuan dari pemerintah desa untuk mendengarkan serta merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan tepat. Selain itu, partisipasi aktif dan kesadaran politik dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi politik, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Desa Pesarean Kabupaten Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Inayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukajaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Mamik. ((2015)). Metodologi Kualitatif. . Zifatama Publisher. .
- Mislawaty, H. &. (2023). Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Pengertian Komunikasi Politik. (2019). adm.fisip.unpatti. Ummah, A. M. (2023). Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance. 34.
- Oktavia, N. (2020) Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Other thesis, IAIN Bengkulu.
- Ramadhania, U. (2022) Pengaruh Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-R.I. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

- Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 24–42.
- Tamara, G. A., Darmastuti, A., & Warganegara, A. (2020). Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan: Telaah Pengaruh Pendidikan Politik, Komunikasi Politian Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik. *Wacana Publik*, 14(02), 113–123
- Slamet Bambang Riono, M. S. dan S. N. U. (2020). Pengaruh Komunikasi Organisasi, Budaya Organisasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Rumah Sakit dr. Soeselo Kabupaten Tegal. *Syntax Idea*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i4.190>